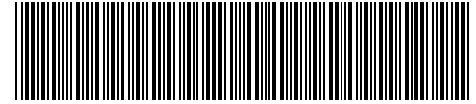




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : SP DIPA- 013.10.2.667779/2023**



DS:5422-0175-6610-2441

Revisi ke 03

Tanggal : 14 Juli 2023

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
3. Provinsi : (33) PAPUA BARAT
4. Kode>Nama Satker : (667779) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT
- Sebesar : Rp. 806.228.000 (DELAPAN RATUS ENAM JUTA DUA RATUS DUA PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	806.228.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN MANOKWARI (065) Rp. 806.228.000

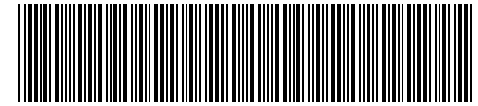
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.10.2.667779/2023



DS:5422-0175-6610-2441

Satker : (667779) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT

BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	134.983.000
BB.5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp.	134.983.000
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	671.245.000
BF.4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp.	671.245.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.10.2.667779/2023
I A. INFORMASI KINERJA**



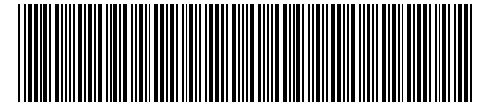
DS:5422-0175-6610-2441

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (667779) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT

Halaman : I A. 1

Program	:	013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi			134.983.000
Kegiatan	:	5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah			134.983.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5256.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	29.360.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Daerah	1,00	Rekomendasi Kebijakan	29.360.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5256.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1,00	Lembaga, Unit Kerja, Tim	105.623.000
Rincian Output	:	01 BDB.001	Fasilitasi Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah	1,00	Lembaga	105.623.000
Program	:	013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			671.245.000
Kegiatan	:	4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah			671.245.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4841.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	7,00	Kelompok Masyarakat	99.090.000
Rincian Output	:	01 BDD.001	Fasilitasi Kelompok Desa Sadar hukum	5,00	Kelompok Masyarakat	69.090.000
Rincian Output	:	02 BDD.002	Layanan Penyuluhan Hukum	2,00	Kelompok Masyarakat	30.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4841.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	5,00	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	69.276.000
Rincian Output	:	01 BIC.001	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum	5,00	Lembaga	69.276.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	4841.BMA	Data dan Informasi Publik	5,00	layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	89.529.000
Rincian Output	:	01 BMA.001	Fasilitasi JDIHN	4,00	layanan	70.454.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.10.2.667779/2023
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:5422-0175-6610-2441

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (667779) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT

Halaman : I A. 2

Data dan Informasi Publik

02	BMA.002	Layanan Perpustakaan Hukum		1.00	layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi layanan	19.075.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	45,00	Orang	360.000.000
Rincian Output	:	01	QBA.U01 Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi (PN)	45.00	Orang	360.000.000
Klasifikasi Rincian Output 5	:	4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat	5,00	Kelompok Masyarakat, Kegiatan	53.350.000
Rincian Output	:	01	QBC.U01 Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi (PN)	5.00	Kegiatan	53.350.000

Jakarta, 30 November 2022
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

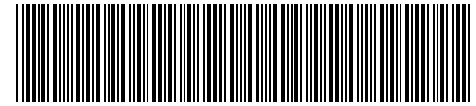
ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : DIPA- 013.10.2.667779/2023

I B. SUMBER DANA



DS:5422-0175-6610-2441

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 Provinsi : (33) PAPUA BARAT
 Kode>Nama Satker : (667779) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT

		Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2023	Rp.	806.228.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	806.228.000		(2) RPLN	US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.10.2.667779/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN**



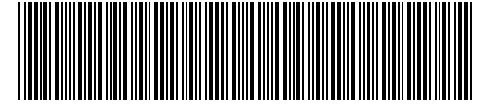
DS:5422-0175-6610-2441

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (667779) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
667779	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT	-	796.228	10.000	-	-	806.228		
013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	134.983	-	-	-	134.983		
5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	-	134.983	-	-	-	134.983		
5256.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (33.51 PAPUA BARAT / KOTA SORONG LAMA)	-	29.360	-	-	-	29.360	33 . 51	
01	RM	-	29.360	-	-	-	29.360	065	
5256.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (33.51 PAPUA BARAT / KOTA SORONG LAMA)	-	105.623	-	-	-	105.623	33 . 51	
01	RM	-	105.623	-	-	-	105.623	065	
013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	661.245	10.000	-	-	671.245		
4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	-	661.245	10.000	-	-	671.245		
4841.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (33.51 PAPUA BARAT / KOTA SORONG LAMA)	-	99.090	-	-	-	99.090	33 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.10.2.667779/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:5422-0175-6610-2441

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (667779) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	99.090	-	-	-	99.090	065	
4841.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (33.51 PAPUA BARAT / KOTA SORONG LAMA)	-	69.276	-	-	-	69.276	33 . 51	
01 RM		-	69.276	-	-	-	69.276	065	
4841.BMA	Data dan Informasi Publik (33.51 PAPUA BARAT / KOTA SORONG LAMA)	-	79.529	10.000	-	-	89.529	33 . 51	
01 RM		-	79.529	10.000	-	-	89.529	065	
4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (33.51 PAPUA BARAT / KOTA SORONG LAMA)	-	360.000	-	-	-	360.000	33 . 51	
01 RM		-	360.000	-	-	-	360.000	065	
4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat (33.51 PAPUA BARAT / KOTA SORONG LAMA)	-	53.350	-	-	-	53.350	33 . 51	
01 RM		-	53.350	-	-	-	53.350	065	
JUMLAH		-	796.228	10.000	-	-	806.228		

Jakarta, 30 November 2022
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.10.2.667779/2023
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:5422-0175-6610-2441

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (667779) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT

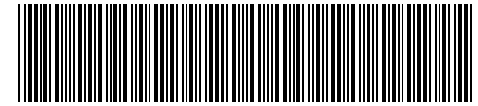
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	667779	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	17.820	107.364	37.143	41.105	119.905	87.550	65.604	105.151	119.131	60.455	45.000	806.228
		BELANJA BARANG	0	17.820	107.364	37.143	41.105	114.505	87.550	65.604	105.151	114.531	60.455	45.000	796.228
		BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	5.400	0	0	0	4.600	0	0	10.000
	013.10.BB.5256	Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	0	13.620	0	23.172	0	0	10.000	33.640	3.625	18.625	32.301	0	134.983
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	13.620	0	23.172	0	0	10.000	33.640	3.625	18.625	32.301	0	134.983
	013.10.BF.4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	0	4.200	107.364	13.971	41.105	119.905	77.550	31.964	101.526	100.506	28.154	45.000	671.245
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	4.200	107.364	13.971	41.105	114.505	77.550	31.964	101.526	95.906	28.154	45.000	661.245
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	5.400	0	0	0	4.600	0	0	10.000

Jakarta, 30 November 2022
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.10.2.667779/2023
IV A. B L O K I R**



DS:5422-0175-6610-2441

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : [33] PAPUA BARAT
Kode dan Nama Satker : [667779] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT

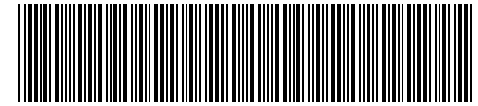
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.10.2.667779/2023
IV B. C A T A T A N**



DS:5422-0175-6610-2441

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : [33] PAPUA BARAT
Kode dan Nama Satker : [667779] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001